

Analisa kapasitas dan kesiapan pemerintah dalam pengelolaan air tanpa melibatkan pihak swasta pasca penghapusan UU no. 7 tahun 2004 studi kasus PAM Jaya PT Palyja = Analysis evaluation of the government readiness capabilities towards remunicipalisation after the abolition of law no. 7 of 2004 case study PAM Jaya PT Palyja / Caroline Krisna Dewi

Caroline Krisna Dewi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20423617&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dengan dihapusnya UU no 7 tahun 2004 serta peraturan pendukung lainnya, maka praktek privatisasi air di Indonesia tidak lagi memiliki payung hukum. Dengan demikian pengadaan air bersih untuk keperluan masyarakat umum, akan kembali dikelola oleh negara, yang mana pada kasus di Jakarta akan diambil alih oleh PAM JAYA. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi serta menganalisa lebih jauh tingkat kesiapan PAM JAYA sebagai perusahaan jasa yang berkomitmen melayani kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta dari segi teknologi, investasi dan pendanaan, serta infrastruktur dan fasilitas pendukung eksisting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jenis survey, dimana subjek penelitian adalah pegawai PAM JAYA. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner berbentuk skala yang diperkuat dengan wawancara. Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan uji validitas eksternal yang hasilnya dapat dipercaya (reliabel) dengan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,705. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Data yang diperoleh selanjutnya dihitung menggunakan teknik presentase dengan perhitungan melalui SPSS 17.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum ditinjau dari segi teknologi, pegawai PAM JAYA tidak terbantu dengan adanya teknologi mitra swasta (51%) sebab teknologi yang digunakan mitra swasta tidak signifikan bagi kinerja pegawai dan tidak jauh berbeda dengan teknologi yang digunakan oleh PAM JAYA. Ditinjau dari segi Investasi dan Pendanaan, tingkat signifikansi investasi swasta dianggap tidak signifikan (45,1%) sebab tingkat investasi yang relatif rendah dan tidak tepat guna. Ditinjau dari segi Infrastruktur dan fasilitas pendukung eksisting mayoritas pegawai PAM JAYA memiliki fasilitas dan infrastruktur penunjang yang sudah cukup memadai (74,51%).

ABSTRACT

Regarding to the abolition of Law no. 7 of 2004 and any other supporting regulations. Therefore, Indonesia's water privatization schemes have no legal protection. By this, the involvement of private parties in managing clean water supply in Indonesia, especially Jakarta will be remunicipalized. In the specific case in Jakarta the one who will take over clean water supply is PAM JAYA. The purpose of this research is to analyze and evaluate the readiness capabilities of PAM JAYA which has a commitment to provide clean water supply to the citizen's of Jakarta to fully take over the water management in Jakarta interm of technology, funding and investment, existing infrastructure and supporting facilities. The approach that being used in this research is descriptive quantitative approach, where the subjects were employees of PAM JAYA. Data collection was done by using questionnaire and deep interview. By using external validity test,

the questionnaire is reliable with coefficient cronbach alpha of 0,705. The data then analyzed by using descriptive quantitative analysis.

Results of this study indicate that in general in terms of technology, employees of PAM JAYA was not helped by the technology of private partners (51%) since the technology that being used by the private sector is not significant for the performance of PAM JAYA employees and not much different from the technology which is used by PAM Jaya. In terms of Investment and Funding, a significance level of private investment is not significant (45.1%). Since the investments were relatively low and not appropriate. In terms of the existing infrastructure and facilities to support the majority of employees performance. PAM JAYA has facilities and supporting infrastructure which is sufficient (74.51%).</i>